

EKSISTENSI PESANTREN DITENGAH PUSARAN RADIKALISME DAN IDEOLOGI TRANSNASIONAL

Moh. Ainur Rokhim¹, Ubaidillah Wasi²

Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Jombang, Indonesia

e-mail: mohainurrokhim79@gmail.com¹, ubaidillahwasi@gmail.com²

Abstract

Religious life in Indonesia is very dynamic with the emergence of various cases with the background of religious radicalism and transnational ideology. This phenomenon has not only developed in certain communities, but its existence has developed in a transnational global form. Islamic boarding schools as part of the Islamic tradition of the archipelago are often associated as a central understanding of fundamental Islam which is the root for the emergence of radical movements in the name of Islam. One of the efforts of religious education is to carry out a process of understanding and forming a mindset, namely by instilling the value of multiculturalism through Islamic boarding school education. This research is a library research with a conceptual and comparative approach and uses content analysis. The method used is a descriptive-analytical method. The results of this study conclude that Islam as a religion of universal compassion (rahmatan lil 'alamin) teaches education by upholding human values, respecting human rights, respecting the diversity of cultures and cultures of society, desiring peace, justice, tolerance, and attitudes that are balanced, and other manifestations of noble morals. Islamic education (pesantren) which teaches hatred of different opinions and beliefs is not ideal for the continuation of diversity and diversity in Indonesia. Islamic boarding schools infiltrated by radicalization need to be reoriented in a direction that is in accordance with the Islamic spirit which teaches mutual respect and brotherhood. A number of values taught are tolerance, moderation, togetherness, equality, mutual respect and multicultural Islamic education.

Keywords: *Islamic boarding schools, radicalism, transnational, terrorism*

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Accepted: February 20 2021 | Reviewed: September 04 2021 | Published: October 25 2021 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

A. Pendahuluan

Aksi pengeboman seperti Bom Bali, Kedutaan Australia, JW. Marriot, dan Ritsz Carlton, dan lainnya yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, telah mengorbankan banyak jiwa dan harta benda. Peristiwa ini diindikasikan oleh

banyak pihak akibat adanya radikalisme agama, khususnya Islam (Mursalin & Ibnu Katsir, 2010).

Lembaga pendidikan Islam tertua dalam sejarah Indonesia ini seringkali diasosiasikan sebagai 'markas atau sentral pemahaman Islam yang sangat fundamental yang kemudian menjadi akar bagi gerakan radikal mengatasnamakan Islam (Newsroom, 2009). Fakta bahwa sebagian besar pelaku aksi radikalisme dan terorisme atas nama Islam di Indonesia adalah alumni pendidikan madrasah atau pondok pesantren memang tidak dapat dihindari. Namun demikian menganggap seluruh lembaga pendidikan jenis tersebut sebagai sumber ajaran radikalisme dan teorisme jelas merupakan kesalahan mendasar mengingat karakteristik dan pola pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang amat beragam. Apalagi sejumlah temuan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia amat berbeda dibandingkan dengan lembaga pendidikan sejenis di negara lain (Newsroom, 2009)

Gerakan politik transnasional telah menghasilkan konflik internal antar agama dan separatisme di Indonesia. Ideologi transnasional juga layaknya pedang yang siap merobek rajutan kesepakatan bersama yang dibangun oleh *founding fathers* kita puluhan tahun silam (*Transnational-Ideology-vs-Pancasila-Ideology-in-Life-of-Nation-and-State*, 2019). Ideologi transnasional bisa dimaknai sebagai ideologi global yang melintasi batas negara dan bangsa. Ia juga bukan hanya sebuah kampanye propaganda atau kepercayaan. Lebih dari itu, ia dapat mempengaruhi kebijakan politik dalam sebuah negara. Cita-cita kelompok Islam transnasional untuk memberlakukan syariat Islam bahkan mengganti Pancasila, ideologi transnasional dianggap tidak cocok dengan kultur keislaman Indonesia yang santun, toleran dan tidak mudah mengkafirkan (Asroor, 2019).

Di tengah pusaran ideologi-ideologi besar itu tidak sedikit umat Islam khususnya kaum muda nahdliyyin, yang terpukau dengan paparan dalil dan argumen yang mereka kemukakan, lalu meyakini kebenaran mereka dan kemudian menaruh sinisme terhadap amalan-amalan keagamaan NU di mana dia lahir dan tumbuh. Ini satu ironi yang jika dibiarkan tanpa penanggulangan akan berdampak negatif terhadap eksistensi NU dan Aswaja ke depan. Oleh karena itu konsolidasi ke dalam sangatlah urgen agar NU tetap eksis dengan misi moderasi (*wasatyyah*) nya, bukan hanya pada level jam"iyah (struktur), tetapi juga jamaah (kultur) (Husni, 2018).

Munculnya gerakan radikal dan transnasional menurut Jamhari dan Jahroni merupakan akibat dari situasi global dunia, termasuk dunia Islam, yang pada saat itu tengah memasuki era modern. Banyak masyarakat muslim yang mengalami

disorientasi akibat ketidaksiapan mereka memasuki periode tersebut (Syaoki, 2017).

Program deradikalisasi Islam kemudian muncul ke permukaan dalam upaya untuk membendung paham radikalisme, transnasional dan terorisme berlatar belakang agama di Indonesia, secara khusus ditujukan untuk ajaran Islam. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Kementerian Agama dan pengelola pendidikan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat lainnya di tanah air aktif mengkampanyekan gerakan deradikalisasi ini. Beragam kegiatan mulai dari seminar dan workshop hingga kegiatan budaya pun dilakukan untuk tujuan ini (Mada, 2011). Respon umat Islam sendiri tentu saja beragam sesuai dengan aliran dan pemahaman keislaman

Latar belakang tersebut di atas, kiranya wajar jika dilakukan kajian terkait eksistensi pondok pesantren beserta peranan, peluang, dan tantangannya terhadap radikalisme dan ideologi transnasional agama di Indonesia, terutama dalam rangka meningkatkan dan mengukuhkan peran lembaga pendidikan Islam yakni Pesantren dalam pembangunan karakter bangsa. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisa peranan yang mungkin diberikan pondok pesantren dalam rangka mengurangi pengaruh radikalisme dan terorisme di Indonesia. Untuk mempermudah pembahasan, artikel ini akan menelaah perkembangan sekilas terkait pondok pesantren, radikalisme agama dalam konteks Indonesia, dan peran pondok pesantren dalam deradikalisasi agama (Darmadji, 2011).

Artikel ini meskipun memiliki kemiripan dengan kajian-kajian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ahmad Darmadji dengan artikelnya yang berjudul "Pondok Pesantren Dan Deradikalisasi Islam Di Indonesia", Noven Kusainun dengan artikelnya yang berjudul "Peran Pendidikan Dasar Islam Dalam Mencegah Radikalisme", dan Ahmad Asrori dengan judul artikelnya " Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas, namun artikel ini memiliki nilai lebih dibanding artikel sebelumnya karena mengkaitkan antara pesantren, radikalisme, dan ideologi transnasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Karena itu dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada buku, jurnal, web, dan lain-lain yang relevan sebagai sumber utama kajiannya. Adapun terkait sumber primer yang penulis gunakan tidak terpaku pada satu buku saja, akan tetapi dari Penulis juga menggunakan pendekatan konsep dan komparasi untuk melihat sejauh mana pondok pesantren berkiprah dalam membendung gelombang

radikalisme dan Islam transnasional di Indonesia (Asroor, 2019). Kemudian Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Radikalisme

a. *Histori* dan Pengertian Radikalisme

Perkembangan zaman dan tuntutan stratifikasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang begitu luas akhir-akhir ini memunculkan sekte-sekte, aliran-aliran, dan mazhab-mazhab baru yang mengatasnamakan Islam dan berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi alam yang eksis di daerah penganutnya, serta cenderung radikal.

Masalah sekaligus ancaman memang sering muncul di tengah-tengah konteks keberagaman di Indonesia yaitu paham radikalisme. Radikalisme bermula dari sikap radikal yang kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan. Radikalisme diartikan sebagai sebuah paham yang menghendaki sebuah perubahan dan tuntutan dengan tindakan-tindakan yang ekstrem. (Widyaningrum & Dugis, 2018) Dari term ini, dapat dicermati bahwa di Indonesia akhir-akhir ini banyak berkembang isu-isu radikalisme. (Parolin, 2010) terlebih setelah hadirnya orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air yang lebih keras dan tidak mengenal toleransi karena dipengaruhi oleh mazhab maliki yang diadopsi dan diintrodusir oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi.

Secara historis, kemunculan kelompok radikal di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah hal yang baru. Karena pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat dan ekonomi kian parah di kalangan pribumi, radikalisme muslim diambil alih oleh kelompok Serikat Islam (SI). (Zada, 2002) Gerakan radikalisme di Indonesia tidak seperti yang terjadi di Timur tengah yang sangat menekankan agenda-agenda politik. (van Dijk & Kaptein J.G., 2016)

Gerakan radikal Islam di Indonesia baru sebatas pada tuntutan dipenuhinya aspirasi Islam, seperti pemberlakuan syariat Islam atau piagam Jakarta. (Azra, 2000) Dalam catatan sejarah, radikalisme Islam semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi, Sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI). (van Dijk & Kaptein J.G., 2016) Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama dan sebagainya. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, hanya saja bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula

Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad, dalam rangka memojokkan Islam. Setelah itu sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militan dan lebih vokal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih tanpak. (Azra, n.d.)

Setelah DI, muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal sama. Dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam, 1978. (Mubarak, 2008) Tidak lama kemudian, setelah pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang bertebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan yang lainnya.

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme Islam makin besar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya "kekhalifahan Islam", pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, dan FPI. (Turmudi, 2005)

Kata radikal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai hal mendasar atau prinsip, sikap menuntut secara keras, dan maju dalam tindakan. (<https://kbbi.web.id/radikal>, n.d.) Radikal dalam definisi tersebut dapat juga dikatakan sebagai pemikiran yang mendasar serta prinsip yang keras. Pemikiran yang radikal akan melahirkan tindakan yang keras, yang sering disebut dengan tuntutan. Sebenarnya kata radikal yang sering terdengar di masyarakat sekarang sudah mengalami pergeseran makna. Kata radikal akhir-akhir ini lebih dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan istilah Islam yang radikal. Radikal itu sendiri merupakan sebuah keniscayaan yaitu pemahaman terhadap Islam secara mendalam yang akan menghasilkan kasih sayang. Tanpa sikap radikal tersebut sebenarnya pemahaman terhadap Islam belum komprehensif. (Iyubenu, 2020)

Pemahaman yang kurang tepat pada akhirnya juga memunculkan sikap yang kurang tepat. Ketika sikap radikal tersebut menjadi sebuah paham, maka dikenal istilah radikalisme. Radikalisme didefinisikan sebagai sebuah paham yang

menghendaki perubahan mendasar dengan cara yang ekstrem. Paham radikalisme sering melibatkan kekerasan dan tindakan-tindakan yang membahayakan dalam memperjuangkan sebuah tuntutan.(Widyaningrum & Dugis, 2018) Definisi lainnya tentang radikalisme yaitu sebagai sebuah gerakan yang menjadikan jihad sebagai cara untuk melawan kekuatan politik. Gerakan radikalisme dalam sebuah negara menghendaki agar negara mengubah sistemnya dengan sistem Islam. Secara ringkasnya, gerakan tersebut menginginkan berdirinya negara Islam dengan cara tindakan-tindakan yang keras.(Abduh Wahid, 2018)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, radikalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang menuntut perubahan dengan cara kekerasan dan ekstrem. Radikalisme juga bisa dipahami sebagai sebuah gerakan yang tidak menerima keberagaman. Radikalisme menjadikan perbedaan sebagai sarana memecah belah persatuan, menghendaki berdirinya sebuah sistem secara seragam, dan mengabaikan nilai-nilai keberagaman.

Radikalisme biasanya membalikkan nilai-nilai yang ada secara cepat dengan kekerasan dan tindakan-tindakan yang ekstrim atau dengan tindakan-tindakan yang sangat merusak (Zada, 2002).

b. Karakteristik dan Tujuan Paham Radikalisme

Sebuah gerakan yang dinilai sebagai radikalisme memiliki beberapa karakteristik. Beberapa di antaranya adalah adanya sikap intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Intoleran berarti tidak mau bersikap toleran atau tidak menghargai perbedaan. Fanatik yaitu sebuah sikap yang menganggap diri paling unggul, sehingga merendahkan orang lain di luar diri dan golongannya. Eksklusif yaitu sebuah sikap yang cenderung ingin menarik dan membedakan diri dari orang lain. Kemudian revolusioner adalah sikap yang menjadikan kekerasan sebagai cara untuk mewujudkan perubahan.(Laisa, 2014)

Tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan sampai ke akarnya dan untuk merealisasikan usaha ini mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada, mempunyai program yang cermat dan memiliki landasan filsafat untuk membenarkan adanya rasa ketidakpuasan dan mengintrodusir inovasi-inovasi. Radikalisme erat sekali hubungannya dengan revolusi. Mereka memiliki rencana jangka panjang antara lain, menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara. Mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya, mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional, regional atau internasional serta memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompoknasional.(Khamid, 2016)

c. Faktor penyebab Radikalisme

Pertama adalah pemahaman agama yang kurang tepat. Memahami ayat Alquran tidak bisa dilakukan dengan memahami secara sepotong-sepotong. *Kedua* adalah literasi yang salah terhadap sejarah Islam. Hal tersebut menyebabkan munculnya apresiasi berlebihan terhadap Islam di masa lampau. *Ketiga* adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya, dengan jaminan akan diberi uang atau insentif lainnya, masyarakat diprovokasi agar terlibat dalam gerakan-gerakan yang radikal. Kondisi ekonomi yang sulit kadang menjadi alasan bagi sebagian kalangan untuk terpengaruh. (Munip, 2012)

Pendapat lainnya tentang penyebab munculnya radikalisme adalah 1) adanya ideologi fanatik, 2) kondisi sosial dan politik, 3) latar belakang pendidikan, 4) faktor budaya, dan 5) adanya ideologi anti-Barat. Ideologi anti-Barat adalah ideologi yang menolak segala konsep yang lahir dari Barat. Alasannya adalah segala pemikiran yang muncul dari Barat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut juga terjadi karena adanya sikap fanatik, sehingga sulit untuk terbuka terhadap peradaban. (Laisa, 2014)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara keseluruhan faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme adalah 1) pemahaman agama yang kurang tepat, 2) adanya ideologi-ideologi fanatik, serta 3) latar belakang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemunculan gerakan Islam radikal di Indonesia disebabkan oleh dua faktor; Pertama, faktor internal dari dalam umat Islam sendiri yang telah terjadi penyimpangan norma-norma agama. Kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan penguasa maupun hegemoni Barat, seperti kasus gerakan Warsidi, Salaman Hafidz dan Imron atau yang dikenal sebagai komando Jihad telah membangkitkan radikalisme di Indonesia. (Asrori, 2017) Jihad sebenarnya menjadi simbol perlawanan yang efektif untuk menggerakkan perang melawan Barat. Kondisi inilah yang menyebabkan permusuhan yang terus menerus antara Islam dan Barat. Fenomena yang terjadi di Indonesia ketika umat Islam bereaksi terhadap serangan Amerika Serikat pada Afghanistan. Di masa inilah, Islam menemukan moment untuk menyuarakan aspirasi Islam (Solidaritas Islam). Karena itulah, kelompok Islam radikal seperti KISDI, Lakar Jihad, FPI, Ikhwanul Muslimin, dan Mujahidin bergerak menentang penyerangan AS. Bahkan, komando jihad juga dikirim ke Afghanistan sebagai bagian dari tugas suci. (Zada, n.d.)

d. Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Dalam Kamus Oxford, *terrorist* dimaknai dengan orang yang melakukan kekerasan terorganisir untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksinya dinamakan terorisme, yakni penggunaan kekerasan dan kengerian atau ancaman, terutama

untuk tujuan-tujuan politis.(Hawkins, 1981) Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah yang umum dipakai untuk menyebut terorisme adalah *al-irhab* dan pelakunya disebut *irhabiy*. Kamus *al-Mu'jam al-Wasit* memberikan definisi *al-irhab* dengan “sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebarkan kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.”(Rodin, 2016)

Faham radikalisme yang dikejawentahkan dalam bentuk kegiatannya dapat dikategorikan sebagai terorisme dimana terdapat suatu ancaman, kekerasan dan mengambil hak asasi manusia.(Khamid, 2016) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai, melihat sejumlah alasan munculnya gerakan radikalisme Islam di Indonesia, yaitu kemiskinan, korupsi, globalisasi, dan sejarah.(Senator Christopher S. Bond and Lewis M. Simons, 2009) Pandangan serupa disampaikan Muhammad Tholhah Hasan, yang menilai munculnya gerakan radikalisme di Indonesia terutama setelah Reformasi disebabkan variabel ajaran dan pemahaman, peranan media internet (IT), kondisi sosial domestik, dan konstalasi politik internasional.(Darmadji, 2011)

Radikalisme di Indonesia banyak melahirkan aksi-aksi kekerasan dan bom bunuh diri seperti bom Bali, bom Hotel JW Marriot, bom Hotel Ritz Carlton, Bom Kedubes Filipina, Bom Bursa Efek Jakarta, Bom malam Natal, Kerusakan Mako Brimob, Bom Surabaya, dan terakhir Penyerangan di Sigi

e. Radikalisme dalam Pesantren

Banyak kalangan yang menilai pesantren sebagai sarang teroris dan tempat persemaian benih-benih terorisme. Penilaian tersebut tentu saja tidak selamanya salah, namun juga tidak selamanya benar. Penilaian tersebut dapat dianggap benar karena ditemukannya fakta dan data yang menunjukkan adanya keterkaitan pesantren tertentu dengan terorisme serta keterlibatan sejumlah alumni pesantren dalam jaringan terorisme dan aksi radikalisme. Mengutip pernyataan BNPT, setidaknya terdapat sejumlah 19 pesantren di Indonesia yang terindikasi mendukung kegiatan radikalisme dan terorisme. Pesantren-pesantren tersebut di antaranya adalah: (1) Pesantren Al-Mukmin Ngruki Surakarta, (2) Pesantren Darus Syifa“ Lombok Timur, (3) Pesantren Darul Wahyain, Magetan, dan lainnya. Keterkaitan pesantren dengan terorisme dan keterlibatan alumninya dalam berbagai aksi terorisme-radikalisme tentu saja merupakan fenomena yang memprihatinkan. Pesantren yang semestinya menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama (*tafaquh fiddin*) dan menanamkan doktrin Islam yang ramah, justru menjadi tempat yang subur bagi tumbuhkembangnya paham radikal. Kenyataan atas kondisi pesantren saat ini tentunya bertolak belakang dengan karakter otentik pesantren di masa-masa awal yang mampu menampilkan wajah toleran dan damai. Pesantren-pesantren di Jawa, terutama yang bermazhab Syafi“i,

mampu bersikap akomodatif dengan budaya lokal, sehingga pembauran pesantren dengan masyarakat berlangsung dengan baik. Karena itu, hampir tidak pernah terjadi radikalisme di kalangan pesantren dalam bentuk aksi kekerasan, apalagi terorisme (Mursalin & Ibnu Katsir, 2010).

2. Ideologi Transnasional

a. *Histori* dan Pengertian Transnasional

Istilah transnasional merupakan gabungan dari dua kata; “trans” yang berarti melintang, melintas, menembus dan melalui. Kemudian “nasional” yang berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Dalam kamus Oxford, keduanya diartikan sebagai berikut, *trans* yang berarti “something that is present or moves from one place to another (on or from the other side of)”. Sedangkan *national* diartikan “a nation or a group of societies which as a whole form the citizens of a state”. (*The Oxford Paper Back Dictionary*, 1994) Istilah transnasional awalnya merupakan sebuah aktifitas diaspora, di mana aktifitas itu ditunjukkan dengan berpindahnya suatu penduduk ke negara lain. Pada perkembangan selanjutnya, istilah transnasional mulai bergeser menjadi suatu interaksi antara seseorang atau institusi yang melewati batas negara nasional modern (Husni, 2018)

Dalam kaitannya dengan agama, khususnya Islam, gerakan Islam transnasional (*transnational Islamic movement*) dapat diterjemahkan dengan suatu gerakan yang memiliki ajaran atau ideologi yang datang dari satu negara ke negara lain. Ia tidak muncul dari dalam, sebaliknya muncul dari luar untuk mempengaruhi warna Islam yang sudah ada dalam sebuah negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Peter Mandaville yang mengatakan bahwa gerakan Islam transnasional dapat dimaknai sebagai gerakan yang tidak hanya terbatas pada wilayah lokal atau nasional. Sebaliknya, aktifitas dan organisasinya jauh melampaui sekat teritorial wilayah (negara bangsa) (Peter Mandaville, 2007)

Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang “unik” dan tanpa kekerasan (Merle Calvin Ricklefs, 2001) yakni dengan pendekatan sufistik-kultural. Memang pada abad ke-7, Islam belum mendapatkan “sambutan” yang meriah dari masyarakat di Nusantara. Akan tetapi, memasuki abad ke-15—menurut beberapa peneliti seperti Jan S Aritonang dan Agus Sunyoto—Islam menemukan momentumnya (mulai banyak dianut masyarakat.pn) (Aritonang, 2004).

Jadi, Islam tidak diterima begitu saja di bumi Nusantara selama tujuh sampai delapan abad lamanya. Bisa dibayangkan betapa lamanya proses ini. Ungkapan Agus senada dengan apa yang diungkapkan A.H. Jhons begitu juga Azyumardi Azra melalui teori sufinya (sekalius menolak teori-teori sebelumnya yang dianggapnya

kurang valid). Menurutnya Islamisasi di bumi Nusantara dilakukan oleh para guru sufi. Guru sufi inilah yang membawa Islam dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh para guru sufi ini adalah Walisongo. Mereka menyebarkan Islam di pulau Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, para guru sufi ini sangat akomodatif sekali. Walisongo mempunyai landasan bahwa yang penting masyarakat masuk Islam dulu, pada saat yang sama menerima praktek-praktek yang lama, tradisional, bahkan mungkin kepercayaan lokal. Karena mereka percaya bahwa ajaran-ajaran Islam akan diterima di masa mendatang (Husni, 2018).

Akan tetapi, memasuki abad ke 19, ajaran Wahabi di Arab Saudi ternyata layaknya virus yang telah menjangkit para agamawan seperti Haji Miskin, Haji Abdurrahman dan Haji Muhammad Arif. Kelompok yang dikomandoi Haji Miskin dan kawan-kawan ini merasa bahwa hanya keislaman mereka saja yang murni (sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah). Sedangkan model keislaman lain yang masih tercampur dengan budaya setempat yang kadang dengan ritual-ritual keagamaan yang sekilas bertentangan dengan ajaran Islam dianggap sesat, bid'ah lalu patut diperangi. Hal inilah yang menurut hemat penulis adalah embrio gerakan radikal transnasional awal di tanah Nusantara.(Husni, 2018) Namun gerakan transnasional yang dibawa oleh Haji Miskin di abad ke 19 tidak begitu berpengaruh dalam model keberislaman masyarakat Indonesia. Terlebih, Indonesia mengalami krisis kemanusiaan (kematian, kelaparan, kemiskinan, diskriminasi) yang disebabkan karena penjajahan Belanda.

Pada periode pasca kemerdekaan, bangsa yang baru tumbuh ini sempat mengalami perdebatan sengit tentang landasan negara yang dipertanyakan kembali. Adanya upaya untuk memasukkan butir-butir Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" akhirnya tenggelam oleh sejarah Indonesia karena "kalah" setelah diuji berkali-kali. Di zaman Soeharto memimpin negeri ini, ideology transnasional hampir tanpa adanya ancaman yang berarti "berkat" sikap otoriter Soeharto. Setelah kekuasaan Soeharto diruntuhkan oleh semangat reformasi, khususnya oleh kalangan aktifis muda, keran demokrasi Indonesia pun dibuka. Karena salah satu prinsip demokrasi adalah terbukanya kebebasan publik, maka berbagai ormas baru pun lahir. Di sinilah awal mula gerakan transnasional menampakkan kakinya dan semakin menjamur seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin (IM) dan Salafi (Wahabi) dalam konteks Indonesia. (Husni, 2018)

b. Karakteristik dan Tujuan Paham Transnasional

Kalau boleh disederhanakan, gerakan Islam transnasional dapat dicirikan sebagai gerakan yang memperjuangkan ajaran Islam yang utuh (*kaffah*) yakni

Islam yang tidak memisahkan agama dan negara, penerapan syariat di seluruh aspek kehidupan, dan menjadikan umat Islam menjadi satu (*ummah*) melalui khilafah, romantisme terhadap model kekhalifahan Islam sebagaimana di masa Nabi dan sahabat. Sebagai misal, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pelabelan Islam transnasional terhadap kelompok ini tidak bisa terpisahkan dari agenda yang mereka perjuangkan, yakni proses transfer ideologi tanpa melalui proses akulturasi. Proses ini (transfer ideologi) terjadi tanpa memperhatikan konteks budaya lokal dalam sebuah masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga “dipaksa” untuk menerima ideologi mereka secara menyeluruh tanpa diberi kesempatan untuk mempertanyakan validitas ajaran dan ideologi mereka. (Thomas NA, n.d.) Perlu diingat, dalam konteks Indonesia, HTI adalah satu dari sekian ideologi transnasional yang pernah menjamur. Bahkan bisa dikatakan HTI memiliki pengikut cukup besar. Selain HTI, masih ada gerakan transnasional lain yang masih “berkeliraran” bebas di tanah air. Seperti misalnya Salafi (Wahabi), Syiah dan Ikhwanul Muslimin (IM), Jemaah Islamiyah, bahkan ISIS. (Husni, 2018)

Tujuan gerakan ini adalah membangun kembali sistem Khilafah Islamiyah dan menegakkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. mempunyai cita-cita membangun tatanan masyarakat dan sistem politik berdasarkan landasan akidah Islam. Islam harus menjadi tatanan aturan kemasyarakatan dan menjadi dasar konstitusi dan Undang-Undang. (Rahmad, 2005) tujuan mereka, yakni formalisasi Islam dalam bentuk negara, aplikasi syariah sebagai hukum positif dan perjuangan Khilafah Islamiyah. Gerakan Islam transnasional ada yang bergerak di bidang pemikiran, Spiritual, dan ada pula yang mengambil jalan politik. (Syaoki, 2017)

c. Faktor penyebab Transnasional

Munculnya gerakan transnasional menurut Jamhari dan Jahroni merupakan akibat dari situasi global dunia, termasuk dunia Islam, yang pada saat itu tengah memasuki era modern. Banyak masyarakat muslim yang mengalami disorientasi akibat ketidaksiapan mereka memasuki periode tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ummat Islam berusaha mencari identitas lewat penafsiran agama yang khas pada intinya menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Munculnya modernitas dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan umat Islam. Munculnya ideologi kapitalisme, nasionalisme, sekulerisme, pluralisme, liberalisme serta sistem demokrasi telah memberikan warna tersendiri di tengah kehidupan umat manusia. Bagi mereka, kehadiran ideologi/gagasan tersebut dianggap sebagai virus yang akan mencemari akidah umat Islam. Dalam usaha untuk membendung tantangan modernitas, kelompok Islam ini mencari

dalil-dalil agama yang dapat dijadikan alasan untuk melegitimasi kebenaran yang akan disampaikan.

Gerakan islam transnasional juga muncul karena adanya rasa kesetiakawanan atau sifat solidaritas terhadap umat Islam seperti di Irak, Afganistan dan Pakistan atas nasib di daerahnya akibat penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Transnasionalisme Islam di Timur Tengah bagi mereka dianggap sebagai langkah efektif dalam membebaskan dirinya dari imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat.

Ada empat gerakan Islam awal yang muncul sebagai ikon perlawanan umat Islam atas kolonialisme Barat. *Pertama*, Pan Islamisme yang didirikan oleh Jamaluddin Al-Afgani. *Kedua*, Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir. *Ketiga*, Al-Jami'at Al-Islamiyah di Pakistan. *Keempat*, Gerakan Wahabiyah yang di konstruk oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam melakukan gerakan purifikasi keislaman di Jazirah Arab. Selain itu, Revolusi Islam Iran yang di pimpin oleh Imam Khomeini juga berpengaruh dalam gerakan Islam di berbagai negara akhir-akhir ini. Dengan semangat yang dibangun di atas spritualitas Islam Syi'ah-nya, masyarakat mampu menjatuhkan Syah Pahlevi (Presiden Iran) yang dianggap sebagai kaki tangan bangsa asing dan dinilai sebagai rezim diktator terhadap masyarakatnya. (Jahroni, 2004)

(Wahid, 2009: 8-9). Wahid dalam melihat infiltrasi gerakan Islam transnasional di Indonesia, cenderung mengkategorikannya sebagai gerakan Islam fundamentalis. Fenomena keberagaman gerakan sosial Islam di era kontemporer telah mewarnai berbagai aktivitas dan dakwah dalam pengembangan Islam secara global atau disebut dengan "Gerakan Islam Transnasional". Gerakan ini umumnya memiliki ciri ideologi yang tidak lagi bertumpu pada konsep kenegaraan (*nation-state*), melainkan cenderung fokus pada konsep ideologi untuk kemaslahatan umat. Gerakan ini didominasi oleh corak pemikiran normatif, skripturalis, fundamentalis yang terkadang secara parsial mengadaptasi gagasan dan instrumen modern. Beberapa organisasi Islam yang termasuk dalam kategori gerakan Islam transnasional dan kaki tangannya yang ada di Indonesia antara lain: Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbut Tahrir di Lebanon, Wahabiyah di Arab Saudi, Jama'ah Islamiyah di Pakistan, Gerakan Salafi Jihadis di Irak dan Afganistan, serta Syi'ah yang berpusat di Iran (Aksa, 2017)

d. Transnasional dalam pesantren

Terungkapnya para pelaku aksi pengeboman Bali yang melibatkan alumni santri Pondok Pesantren al-Islam di Lamongan, radikalisme sering kali dikaitkan dengan pendidikan keagamaan di pesantren. Tampaknya ada keterkaitan antara pendidikan keagamaan di pesantren, radikalisme dan ideology transnasional.

Seiring beragamnya corak pesantren di wilayah Nusantara, dari pesantren salaf atau tradisional (pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, khususnya Islam klasik) sampai pesantren khalaf atau modern, yang sudah mengajarkan mata pelajaran umum, wajah pesantren perlahan-lahan berubah. Pesantren tidak lagi menjadi agen perubahan sosial dengan kemampuannya beradaptasi dengan tradisi lokal, melainkan melakukan purifikasi yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti di Lamongan dan Ngruki, pesantren justru memproduksi proses radikalisme secara doktrinal. Inilah yang membuktikan bahwa pesantren telah terkontaminasi oleh ideologi transnasional yang kemudian ikut mempersubur gejala radikalisme di kalangan pesantren. Karena itu, radikalisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan pola pendidikan keagamaan di pesantren, yakni pengajaran agama yang eksklusif dan dogmatik telah melahirkan sikap permusuhan dengan kelompok di luarnya (Mursalin & Ibnu Katsir, 2010).

3. Pesantren sebagai lembaga Pendidikan islam Pencegah Radikalisme dan Ideologi Transnasional

a. Pengertian Pondok Pesantren dan Perkembangannya

Kata pondok dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai “madrasah dan asrama (tempat mengaji, belajar agama Islam)”.(Bahasa, 2008) Kata ini dapat dimaknai sebagai tempat tinggal atau tempat menginap sebagaimana kata funduq dalam Bahasa Arab yang saat ini dimaknai hotel atau penginapan.(Aini, 2009) Sedangkan kata pesantren sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai “asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dsb”.(Bahasa, 2008) Pesantren secara bahasa berasal dari kata santri yang dirangkai dengan awalan pe- dan akhiran -an. Santri sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, shastri, yaitu orang-orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu.(Abidin, 2008) Pondok pesantren secara bahasa dengan demikian merupakan perpaduan dari dua budaya yang berlainan namun mengakar dalam sejarah Nusantara.

Peranan pondok pesantren dalam pendidikan nasional makin terasa di saat penjajahan Belanda mencengkeram tanah air. Pondok pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat luas yang bukan priyayi untuk menempuh pendidikan, mengingat terbatasnya ruang bagi mereka di pendidikan formal yang dilaksanakan penjajah. Tokoh-tokoh nasional yang lahir dari rahim pendidikan pondok pesantren dan memberikan dampak besar bagi perjuangan kemerdekaan antara lain H.O.S. Cokroaminoto, K.H. Mas Mansur, K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. A. Kahar Muzakir, dan lain-lain.(Abidin, 2008) Sementara di masa mempertahankan dan mengisi

kemerdekaan, tokoh-tokoh alumni pondok pesantren juga berperan penting bagi bangsa seperti tercermin dalam diri Moh. Rosyidi, Moh. Natsir, K.H. A. Wahid Hasyim, K.H. Muslih Purwokerto, K.H. Imam Zarkasy, K.H. Idham Khalid, dan lain-lain. Peranan alumni pondok pesantren kemudian mengkulminasi pada dimensi politik dengan capaian K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan hadirnya Hamzah Haz sebagai wakil presiden di era selanjutnya.

Secara kelembagaan, pondok pesantren sejak tahun 1970-an mengalami perkembangan yang signifikan. Data Departemen Agama RI menunjukkan bahwa pada 1977 terdapat 4.195 pondok pesantren di Indonesia dengan 677.304 orang santri, Perkembangan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Data Kementrian Agama RI menunjukkan bahwa sampai tahun 2008 terdapat 21.521 pondok pesantren dan terdapat 3.818.469 santri di seluruh Indonesia. jumlah pengajar yang mengabdikan diri pada pendidikan di pondok pesantren secara nasional 281.591 orang, yang sebagian besar adalah Non PNS (95,28% dari total pengajar) secara umum menunjukkan posisi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang independen sekaligus menunjukkan personalitas . pengajar yang teguh memegang keikhlasan dalam menjalankan tugasnya.

b. Watak Pesantren dalam lingkaran Fundamental dan Tradisional

Watak Pesantren dalam lingkaran Fundamental dan Tradisional Dapat dilihat sejauh ini munculnya gerakan fundamentalis Islam tidak lebih dari dikotomi antara tradisionalisme dengan modernisme, keberadaannya justru mengakibatkan gagasan radikal dan terlalu mengarah kepada misi politis yang menjadi bagian kuat di republik ini. keberadaan Pesantren sebaiknya menjadi solusi konstruktif sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam dalam membangun normatik-religius (nilai-nilai ke-Agamaan) disamping tetap membuka diri pada aspek-aspek ilmu pengetahuan, science dan teknologi serta beradaptasi dengan perkembangan.

Tradisionalisme yang melekat dan terbangun lama di kalangan pesantren, sejak awal minimal ditampilkan oleh dua wajah yang berbeda. Oleh karena itu, penyebutan tradisional tentu harus ditujukan pada aspek yang spesifik, tidak asal diratakan pemahamannya. Tradisionalisme pesantren di satu sisi melekat pada asas keagamaan, yang merupakan praktek keagamaan lokal yang diwariskan umat Islam Indonesia generasi pertama.(Abdurrahman Wahid, 1988) Di sini Islam berbaur dengan sistem adat dan kebiasaan lokal, sehingga melahirkan watak keIslaman yang khas Indonesia (Bruinessen, 1999).

Dalam hal ini, memang diperlukan adanya pembaharuan di pesantren, terutama mengenai metodologi pengajarannya, namun pembaharuan ini tidak harus meninggalkan praktek pengajaran lama (tradisional), karena memang di sinilah karakter khas dan indigenitas pesantren sebagai lembaga pendidikan

Islam di Indonesia. Justru yang perlu dilakukan adalah, adanya konfigurasi sistemik dan kultural antara metodologi tradisional dengan metodologi konvensional-modern (Chumaedy, 2002).

c. Pesantren dalam lingkaran Modernitas

Pada taraf ini, pesantren berhadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas, dan hanya berkuat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang melulu bermuatan al-Qur'an dan al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya, (Saifullah, 2017) tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat. Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di muka, tentu saja harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik bisa lebih maksimal, di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren. Dengan begitu, pengembangan pesantren tidak saja dilakukan dengan cara memasukkan pengetahuan non-agama, melainkan agar lebih efektif dan signifikan, praktek pengajaran harus menerapkan metodologi yang lebih variatif. Sebab, ketika didaktik-metodik yang diterapkan masih berkuat pada cara-cara lama yang kurang adaptif dengan kebutuhan, maka selama itu pula pesantren sulit untuk berkompetisi dengan institusi pendidikan lainnya, Sehingga pesantren tidak boleh hanya mengajarkan pendidikan agama tapi sudah harus membuka pendidikan formal. Dan ini menjadi salah satu penyebab pergeseran orientasi. (Aziz, 2020)

d. Tradisi dan filosofi pesantren yang bisa digunakan untuk menangkal gerakan radikal dan teroris

Abdurrahman Wahid dalam bukunya "Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren" menyebut tiga nilai utama yang lazim dikembangkan dalam pesantren. Nilai utama yang pertama adalah nilai ibadah. Nilai kedua yang muncul adalah kecintaan yang tinggi pada ilmu pengetahuan agama. Nilai utama ketiga yang berkembang di pesantren adalah keikhlasan atau ketulusan bekerja untuk tujuan-tujuan bersama. (Abdurrahman Wahid, 2001) Kyai Abdul Jalil menunjukkan tiga tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas yang paling rendah adalah keikhlasan seorang muslim yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama hanya karena adanya perintah. Tingkatan ikhlas kedua adalah keikhlasan seorang muslim yang melaksanakan amalan ibadah bukan karena semata-mata menjalankan kewajiban, melainkan karena telah menjadi kebutuhan hidupnya. Tingkatan ikhlas ketiga adalah keikhlasan seorang muslim yang mengerjakan ibadah ritual dan sosial semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. (Dhofier, 2011) Pondok Modern Gontor menyebut lima nilai, yang dikembangkannya sebagai Panca Jiwa:

jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari (self-help), jiwa ukhuwwah diniyyah yang demokratis, dan jiwa bebas.

Jiwa Keikhlasan, yaitu semangat kerelaan dan ketulusan (sepi ing pamrih) dalam melaksanakan segala segi kehidupan di pesantren, bukan didorong untuk mendapatkan keuntungan. Bukan hanya kyai yang harus ikhlas dalam mengajar, tetapi para pembantunya juga harus ikhlas dalam menjalankan tugas di pesantren, dan para santri ikhlas dalam belajar, semata-mata sebagai ibadah. Semangat keikhlasan yang ditunjukkan oleh kyai dan guru-guru itu pada gilirannya menjadi tauladan bagi para santri dalam belajar dan siap menerima segala yang diperintahkan kepada mereka. Tidak mengherankan jika dalam pembangunan gedung atau bangunan para santri selalu dilibatkan, apakah dengan mengangkat batu bata, genteng atau lainnya. Semua itu diberikan dengan sengaja untuk menanamkan jiwa keikhlasan pada mereka. Suasana keikhlasan dalam pesantren itu kemudian melahirkan suasana harmonis antara kyai yang disegani dan santri yang taat, cinta dan penuh hormat.

Jiwa Kesederhanaan, yang diartikan bukan dalam pengertian pasif atau nrimo. Kesederhanaan juga bukan berarti miskin atau melarat, tetapi hidup sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Kesederhanaan harus dipahami secara proporsional antara kemampuan dan kebutuhan. Semangat kesederhanaan seperti itu dijalankan baik oleh kyai, guru-guru maupun para santri. Dalam hal makan, tempat tinggal dan pakaian, misalnya, para santri dianjurkan tidak boros. Makan cukup memenuhi kriteria sehat dan bergizi, tanpa harus yang enak-enak; tempat tidur tidak perlu kasur yang empuk, tetapi cukup untuk beristirahat; dan pakaian tidak perlu yang mahal, namun suci dan dapat menutup aurat. Dengan jiwa seperti itu, para santri hidup dalam suasana kebersamaan, tidak dibedakan antara anak orang kaya dan miskin. Mereka makan makanan yang sama dan tidur di tempat yang sama. Namun, di balik jiwa kesederhanaan itu terdapat nilai kekuatan, ketabahan dan pengendalian diri dalam hidup.

Jiwa Berdikari (self-help) atau Zelp berdruiiping system (sama-sama memberikan iuran dan sama-sama memakai). Maksudnya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak selalu mengandalkan bantuan orang lain. Semangat seperti itu tidak hanya harus dijalankan oleh para santri, tetapi oleh pondok sendiri. Di pesantren umumnya, para santri harus mengurus sendiri kebutuhannya, buku-buku, pakaian, alat tidurnya, kegiatan olah raga dan kesenian yang disukainya, bahkan mengurus keuangannya sendiri. Melalui semangat berdikari ini sesungguhnya terkandung pendidikan dan latihan kepemimpinan bagi para santri. Mereka memperoleh sarana untuk mengekspresikan kemampuan memimpin dalam organisasi, di samping dalam kepanitiaan dalam kesempatan

lainnya, seperti Panitia Bulan Ramadhan dan Panitia Bulan Syawwal. Mereka juga memperoleh ketrampilan mental (mental skill) dipandang lebih unggul ketimbang ketrampilan kerja (job skill). Jika yang terakhir hanya akan mendorong santri menjadi pekerja, yang pertama lebih mendorong untuk menjadi pemimpin, pengelola, organisatoris atau organizer.

Jiwa Ukhuwwah Islamiyyah atau Diniyyah. Yaitu, semangat persaudaraan yang akrab dalam kehidupan pesantren. Seperti ilustrasi pada pondok Gontor, Semua penghuni pondok diliputi oleh rasa suka dan duka bersama. Baik para santri maupun guru yang berasal dari berbagai daerah diharuskan menanggalkan seluruh atribut kedaerahan. Misalnya, segera setelah diterima sebagai santri, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia, dilarang keras menggunakan bahasa daerah, dan setengah tahun kemudian harus berbahasa Arab. Rasa persaudaraan selama di pondok ini juga tetap tertanam mendalam setelah mereka keluar. Mereka kemudian dihimpun dalam wadah organisasi yang bernama Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor yang dibenyuk untuk menjalin semangat persaudaraan. Pada prinsipnya, Pendidikan pesantren dengan sistem asrama (pondok), berhasil mempersatukan dan merekatkan hubungan anak-anak bangsa dari semua lapisan masyarakat, baik anak petani, anak saudagar, anak bangsawan, semua berkumpul dalam ikatan nilai persamaan dan kebersamaan dalam kepemimpinan seorang kyai yang sederhana dan merakyat, sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakatnya dengan profesi yang beraneka ragam, tetap merasa dalam kesatuan karena perikatan lahir dan batin yang tertanam sejak ada dalam pendidikan pesantren. (Mursyid, 2017)

Jiwa Bebas. Maksudnya, semangat bebas berpikir dan berbuat, menentukan masa depan dan pilihan hidup, juga bebas dari pengaruh negatif manapun. Namun, karena kebebasan itu juga memiliki unsur-unsur negatif, ia harus diwujudkan secara positif dan penuh tanggung jawab. Pesantren juga tidak pernah mengarahkan para santrinya agar setelah lulus melanjutkan ke perguruan tertentu dan berkarier dalam bidang tertentu. Mereka boleh masuk perguruan manapun dan aktif dalam bidang apa saja. Karena itu, para alumni pesantren terlihat sangat beragam kariernya, yang merentang dari ulama dan kyai, cendekiawan, budayawan, politisi, birokrat, militer, pengusaha hingga guru ngaji.

Kedekatan Pesantren dengan masyarakat paling bawah, memperkaya pendidikan kultural, kerohanian masyarakat, memupuk solidaritas dan mengukuhkan semangat kebangsaan yang bertumpu pada tiga nilai dasar; persatuan, kemandirian dan kemerdekaan. (Mursyid, 2017)

e. Peran dan Peluang Pesantren Dalam Menghadapi Tantangan Radikalisme dan Ideologi Transnasional

Banyak peran dan peluang positif yang bisa dijumpai dari dunia pesantren, namun harus diakui bahwa kalangan pesantren banyak yang masih memegang cara pandang keagamaan konservatif. Cara pandang konservatif tidak selalu negative. Jargon al-mukhafadzah ala al-qadim al-shalih memang tampak dijadikan pedoman oleh kalangan pesantren. Akan tetapi pesantren juga tampaknya perlu untuk diperkenalkan dengan konsep baru atau cara pandang baru yang lebih baik atau al-ahdzu bi al-jadid al-ashlah. Justru al-ahdzu bi al-jadid al-ashlah inilah yang tampaknya masih kurang diperhatikan oleh kalangan pesantren. Misalnya, kalangan pesantren sudah cukup progresif pada saat menyatakan bahwa jihad yang diperlukan masa kini adalah memerangi kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan. Tetapi masih ada yang masih merujuk pandangan konservatif, misalnya, pada saat mereka mendukung perlunya dakwah didukung dengan kekuatan senjata. Pandangan seperti ini disamping akan memberikan citra negative juga akan mudah dijadikan pintu masuk bagi kelompok radikal untuk memprovokasi kekerasan atas nama agama.

Dukungan yang tinggi terhadap demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan nasionalisme, juga merupakan peluang yang bisa dijadikan modal oleh pesantren untuk menangkal munculnya gejala radikalisme di lingkungan pesantren. Gagasan demokrasi, NKRI, Pancasila sebagai ideology Negara, gagasan nasionalisme didukung 100 % dikalangan pesantren.

Pandangan kalangan pesantren yang menganggap perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mestinya menjadi rahmat karena akan menjadikan umat memiliki banyak pilihan, juga bisa dijadikan entri poin untuk mendorong budaya toleran terhadap perbedaan. dukungan Pesantren yang kongkrit terhadap proses demokratisasi yang ada di Indonesia akan sangat membantu dalam menekan kelompok radikal. Sebab seradikal apapun ideologi suatu gerakan, bila mereka menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang didalamnya termasuk prinsip hukum dan hak asasi manusia, maka sebenarnya sudah tidak lagi radikal. Sebab prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk bermusyawarah atau bernegosiasi dalam mengatur wilayah public. Prinsip demokrasi mengajarkan masyarakat untuk bisa menerima hanya sebagian dari apa yang diinginkanya.

Aspek lain yang juga bisa dikembangkan dalam pesantren adalah adanya fakta bahwa kalangan pesantren biasanya berusaha mengajarkan Islam secara utuh meliputi aqidah, ibadah dan akhlak atau iman, Islam dan ihsan. Sebagaimana diyakini bahwa sebagian muslim yang terjebak dalam gerakan radikal terjadi karena kelompok ini belum memahami Islam secara komprehensif. Mereka

menjadi radikal karena hasil indokrinasi sesaat. Sehingga andaikata mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan aspek intelektualismenya dan juga aspek spiritualismenya, maka dengan sendirinya mereka akan meninggalkan paham yang radikal. Adalah penting untuk memperkenalkan tata bahasa Arab dan Fiqih kepada santri, tetapi itu saja tidak cukup. Santri perlu belajar sejarah, filsafat dan tasawuf dalam Islam. Sebab semakin tinggi pengetahuan atau wawasan seseorang maka ia semakin bisa bersikap inklusif, moderat atau tawasuth.

D. Simpulan

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mentransfer nilai dan pengetahuan, memiliki *social function* dan sangat berperan dalam mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dan harmonis bagi masyarakat pada umumnya. Pesantren di Indonesia berkembang dalam kerangka yang relatif khas dan memiliki watak yang berbeda dengan pendidikan sejenis di negara lain mengingat sifat damai yang dirasakan saat Islam masuk ke Nusantara. Hal ini berimplikasi pada watak keislaman yang damai di sebagian besar pesantren yang ada termasuk kontribusi yang diberikan bagi bangsa dan Negara. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga yang identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Pesantren senantiasa mentransmisikan pemahaman keagamaan Islam yang ramah, damai, toleran, saling menghargai, dan tidak radikal. Jauh dari doktrin radikalisme, saling mengkafir-bid'ahkan. Radikalisme agama sangat mengancam masa depan pesantren dan generasi bangsa. Ideologi transnasional juga membawa pengaruh negatif yang radikal dan terkadang menghasilkan terorisme yang mengganggu ketertiban dan keamanan serta keutuhan bangsa. Pendidikan Islam (pesantren) yang mengajarkan kebencian terhadap pendapat dan keyakinan yang berbeda sangatlah tidak ideal bagi kelangsungan kebhinekaan dan keragaman di Indonesia. Hal ini juga tidak sesuai dengan misi perdamaian yang diusung oleh Islam sebagai *Din rahmatan lil,alamin*. Pendidikan Islam yang inklusif, toleran, multikulturalis, dan humanis yang mengajarkan kasih sayang, kesantunan, menghormati orang lain, dan kerukunan, sehingga di masa mendatang dapat mendorong terwujudnya keharmonisan dalam keberagamaan di bumi Nusantara. Peran yang penting adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya menentukan pilihan nilai yang akan dijadikan pegangan hidupnya, seperti kebebasan, persamaan, toleransi, kesetiakawanan, keadilan, kejujuran, dan kesabaran, baik dalam lingkup lembaga pendidikan, masyarakat, maupun negara.

Daftar Rujukan

- Abidin, Z. (2008). Pesantren dan Transformasi Sosial: Memotret Peran Pesantren dalam Pembangunan Masyarakat Madani". *Media Nusantara*, 3, 95–108.
- Aini, N. (2009). Pesantren, Organisasi Modern Islam di Masa Penjajahan. *Darussalam Jurnal Ilmiah Islam Dan Sosial*, 8(1).
- Aksa, A. (2017). GERAKAN ISLAM TRANSNASIONAL: SEBUAH NOMENKLATUR, SEJARAH DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA. *Yupa: Historical Studies Journal*. <https://doi.org/10.26523/yupa.v1i1.6>
- Aritonang, J. S. (2004). *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Bpk Gunung Mulia.
- Asroor, Z. (2019). Islam Transnasional vs Islam Moderat: Upaya NU dan MD dalam Menyuarakan Islam Moderat di Panggung Dunia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.807>
- Asrori, A. (2017). RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas dan Antropisitas. *KALAM*. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Aziz, A. (2020). AKAR MODERASI BERAGAMA DI PESANTREN (Studi Kasus di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.348>
- Azra, A. (n.d.). Radikalisme Islam Indonesia. *Tempo*.
- Azra, A. (2000). Muslimin Indonesia: Viabilitas "Garis Keras. *Gatra Edisi Khusus*, 45.
- Bahasa, T. P. K. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Bruinessen, M. Van. (1999). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tareka: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- Chumaedy, A. El. (2002). *Membongkar Tradisionalisme Pendidikan Pesantren; "Sebuah Pilihan Sejarah."*
- Darmadji, A. (2011). PONDOK PESANTREN DAN DERADIKALISASI ISLAM DI INDONESIA. *Millah*. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art12>
- Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren, cet. VI, Jakarta: LP3ES.
- Hawkins, J. M. (1981). *Oxford Universal Dictionary*. Oxford University Press. <https://kbbi.web.id/radikal>. (n.d.).
- Husni, Z. M. (2018). NU DI TENGAH PUSARAN IDEOLOGI-IDEOLOGI TRANSNASIONAL. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.68>
- Iyubenu, E. A. (2020). *Berislam dengan Akal Sehat*. Diva Press.
- Jahroni, J. dan J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>
- Laisa, E. (2014). ISLAM DAN RADIKALISME. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Mada, S. O. U. G. (2011). *Perangi Terorisme Kedepankan Strategi Deradikalisasi*. 1 Maret. <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=3493>

- Merle Calvin Ricklefs. (2001). *A History of Modern Indonesia since c 1200*. Palgrave.
- Mubarak, Z. (2008). *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*. LP3ES.
- Munip, A. (2012). Menangkal Radikalisme di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Mursalina, A., & Ibnu Katsir. (2010). Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-pesantren di Provinsi Jambi. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Mursyid, A. (2017). PLURALITY EXIBITION AND ITS IMPLICATION TO BUILD TOLERANCE ISLAMIC COLLEGE (A CASE STUDY AT PONDOK PESANTREN TEBUIRENG, JOMBANG). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*.
- Newsroom, R. (2009). *Perlu Deradikalisasi Pemahaman Islam di Ponpes*. Jumat, 6 Februari. <http://koran.republika.co.id/berita/29871>
- Parolin, C. (2010). Radical Spaces : Venues of popular politics in London, 1790-c. 1845. In *Radical Spaces : Venues of popular politics in London, 1790-c. 1845*. https://doi.org/10.26530/oapen_459482
- Peter Mandaville. (2007). *Global Political Islam*. Routledge.
- Rahmad, I. (2005). *Arus Baru Islam Radikal*. Erlangga.
- Rodin, D. (2016). ISLAM DAN RADIKALISME: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an. *ADDIN*. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>
- Saifullah, I. (2017). Transnasional Islam Dan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan UNIGA*.
- Senator Christopher S. Bond and Lewis M. Simons. (2009). The Next Front Southeast Asia and the Road to Global Peace with Islam. In *John Wiley & Sons, Inc.*
- Syaoki, M. (2017). GERAKAN ISLAM TRANSNASIONAL DAN PERUBAHAN PETA DAKWAH DI INDONESIA. *Komunike, IX(2)*.
- The Oxford Paper Back Dictionary*. (1994). Oxford University Press.
- Thomas NA, D. (n.d.). Pancasila Ideology vs Transnational Ideology Movement’ Proceeding. *The 5th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS)*, 568.
- transnational-ideology-vs-pancasila-ideology-in-life-of-nation-and-state*. (2019). <http://www.neraca.co.id/article/83863/transnational-ideology-vs-pancasila-ideology-in-life-of-nation-and-state>
- Turmudi, E. (2005). *Endang Turmudi*. Lipi Press.
- van Dijk, K., & Kaptein J.G., N. (2016). Islam, Politics and Change. In *Islam, Politics and Change*. https://doi.org/10.26530/oapen_605451
- Wahid, Abduh. (2018). Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*.
- Wahid, Abdurrahman. (1988). *Principle of Pesantren Education*. P3M.
- Wahid, Abdurrahman. (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. LkiS.

- Widyaningrum, A. Y., & Dugis, N. S. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.368>
- Zada, K. (n.d.). Islam Radikalisme, Dalam Menelisik Akar-Akar Radikalisme di Indonesia. *Compasiana*, 97.